



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

RABU, 06 JUNI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

2019, BS Harus Bisa WTP



Yevri Sudioanto

KOTA MANNA, BE - Ketua DPRD Bengkulu Selatan (BS), Yevri Sudioanto memberikan apresiasi atas komitmen para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). "Dengan adanya komitmen ini, tentu warga BS menunggunya, sehingga 2019 predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

bisa kita raih," katanya. Yevri menambahkan, dengan komitmen tersebut, maka hingga 28 Juli mendatang, semua temuan BPK baik mengenai aset maupun kelebihan bayar atau temuan kerugian negara, harus sudah tuntas. Dengan begitu, mulai saat ini tidak ada lagi alasan bagi para kepala OPD untuk bersantai. Namun sudah mulai fokus menelusuri temuan tersebut. "Komit-

men sudah disepakati, artinya hingga 2019 tidak ada lagi temuan yang tidak tuntas, namun jika masih ada, artinya komitmen tersebut hanya omong doang, setelah disepakati lalu didiamkan saja," tandasnya. Pelaksana tugas (Plt) Sekkab BS, Ir H Nurmansyah Samid mengatakan dengan adanya komitmen bersama 11 kepala OPD tersebut, maka dirinya siap menagih janji

para kepala OPD, jika hingga 28 Juli LHP BPK belum selesai dituntaskan. Bahkan sebelum 28 Juli, dirinya sudah meminta para kepala OPD menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut temuan BPK akhir Juni. "28 Juni saya minta semua kepala OPD menyampaikan perkembangan tindak lanjut, jika ada kendala bisa dicarikan solusinya," ujarnya. Setelah itu, 28 Juli semua

temuan BPK harus selesai ditindaklanjuti. Jika tidak selesai, maka dirinya akan menagih komitmen semua kepala OPD. "Kepala OPD yang membuat komitmen dihadapan pak Plt Bupati, kalau tidak mampu menyelesaikannya, silahkan mengudurkan diri saja," tandas Nurmansyah Samid. Sebelumnya, dari LHP BPK yang diserahkan 28 mei di gedung BPK perwakilan

Bengkulu, BS meraih predikat WDP. Hal itu lantaran dari LHP ada temuan di 11 OPD mengenai aset yang belum tuntas, serta ada temuan kerugian negara. Ke-11 OPD tersebut yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinkes, Sekretariat DPRD BS, Dinas Pertanian, Dinas Dikbud, Kantor Kecamatan Manna, BPPKB, BPKAD, Sekretariat Pemda BS dan RSUDHD Manna BS. (369)